



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN CAKUNG

**KELURAHAN JATINEGARA**

Jl. Raya Bekasi Km 18 Email. kel\_jatinegara@jakarta.go.id  
JAKARTA

Kode Pos 13930

Nomor : 558 /HM.10.02

2 Agustus 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Usulan Daftar Informasi  
Publik yang Dikecualikan

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik Provinsi  
DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 1552/HM.10.02 tanggal 24 Juli 2023 Hal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, Bersama ini kami sampaikan Usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan/ Rahasia Kelurahan Jatinegara sebagaimana terlampir.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/ RAHASIA KELURAHAN JATINEGARA**

No	Nama/ Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi Pentingnya Bagi Publik	
				Jika Dibuka	Jika Ditutup
1	Dokumen Proses Penawaran Barang dan Jasa (KAK, RUP, RAB, HPS, Kontrak, Dokumen Pengadaan, Spesifikasi Teknis/ Gambar, BA Klarifikasi/ BA Negosiasi, Pengumuman Pemenang, Berita Acara Hasil Lelang)	Pasal 17 huruf b undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan pengumuman pemenang	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat
2	Dokumen SPJ keuangan yang belum di audit	Pasal 17 huruf b,h,i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terbuka sampai audit keuangan selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengaduan/ Lembaga pemerintah secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak yang tidak berwenang b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi
3	Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Pasal 17 huruf i undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 10 Tahun ; dan b. Terbuka apabila ada ada perintah pengaduan/ Lembaga pemerintah secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari pemberian informasi atau data yang tidak tepat b. Menghindari penyalahgunaan informasi atau data

4	Data Pribadi Pegawai	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah dari pengadilan/ Lembaga pemerintah secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pegawai	Untuk melindungi data dan informasi pribadi pegawai
5	Informasi yang belum dikuasai atau belum di dokumentasikan	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan pemberian informasi menjadi tidak valid	c. Menghindari pemberian informasi atau data yang tidak tepat d. Menghindari penyalahgunaan informasi atau data
6	Surat Pernyataan Ahli Waris	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Melindungi isi data otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
7	Surat Pengantar Rekomendasi Tanah	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan dalam rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Melindungi dalam rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property
8	Naskah Dinas yang bersifat rahasia	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah dari pengadilan/ Lembaga pemerintah secara tertulis	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik

Jakarta, 24 Juli 2023



